



# RENJA PERUBAHAN

## 2018

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 mengacu kepada arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2018. Renja disusun dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap kondisi exiting Badan Kepegawaian Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Tahun berjalan sampai Triwulan II serta pertimbangan kebutuhan tahun 2018.

Harapan kami Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang mana dapat menunjang visi dan misi Provinsi Riau

Pekanbaru, September 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU,**



**IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19650904 199703 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
I.1. Latar Belakang .....	I-1
I.2. Landasan Hukum.....	I-2
I.3. Maksud dan Tujuan .....	I-2
I.4. Dasar Pertimbangan .....	I-3
I.5. Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....</b>	<b>II-1</b>
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 s/d 2017.....	II-1
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2018 sampai dengan Triwulan II.....	II-8
<b>BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
III.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.....	III-1
III.2. Program dan Kegiatan .....	III-2
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>IV-1</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD	
Sampai dengan Triwulan II tahun 2018 .....	II-4
Tabel III.1. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan	
Tahun 2018.....	III-6



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jln. Cut Nyak Dien No... Telp. (0761) 33073, 848593, 21172, 28997 Fax. (0761) 21172, 22513  
PEKANBARU – RIAU

Kode Pos : 28126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**NOMOR :Kpts. /BKD/1.1/IX/2018  
TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU TAHUN 2018**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi saldo pemerintah daerah anggaran lebih tahun sebelumnya yang lebih kecil dari proyeksi, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ,b dan c , perlu menetapkan pengesahan tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000-2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau; dan  
15. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : Oktober 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**



**IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650904199703 1 001



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2018 menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun

untuk mewujudkan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2018.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2018, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019;

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
18. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018; dan
19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2017.

Secara umum tujuan dari penyusunan perubahan Renja BKD Provinsi Riau pada tahun 2018 adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang sistematis sebagai acuan terhadap pelaksanaan proses pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam kebijakan APBD Perubahan Tahun 2018. Adapun secara spesifik, tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018 adalah;

- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- Mengevaluasi terhadap program - program dan kegiatan - kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya ;
- Mengumpulkan rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dari unit - unit dalam lingkup kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau ;

- Memilih, memilah dan menelaah rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas ;
- Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Perubahan tahun 2018 bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

#### **I.4 DASAR PERTIMBANGAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Riau sampai dengan satu semester tahun berjalan telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan terhadap RKPD tahun 2018 dan selanjutnya diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II (kedua) tahun 2018. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Kebijakan kebijakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang tidak tetap sehingga adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan dari pada kebijakan kebijakan yang ada berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya (2017) tidak sesuai dengan perkiraan saldo anggaran yang diperkirakan pada rkpd provinsi pada tahun 2018. Oleh karenanya selisih riil saldo anggaran tahun 2017 dengan perkiraan saldo anggaran pada tahun 2018 harus dirasionalisasikan pada tahun berjalan (2018).

Kondisi perubahan kerangka ekonomi daerah dimana kondisi

perekonomian di Provinsi Riau sampai dengan akhir tahun 2018 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan perekonomian dunia beberapa hal yang diduga sangat signifikan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Riau adalah :

1. Pengaruh fluktuasi perekonomian global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
2. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar;
3. Pembangunan infrastruktur yang mengalami perlambatan;
4. Persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018;
5. Pembayaran utang Provinsi Riau yang harus dibayarkan.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi daerah pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan prediksi tahun 2018 dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau relative stabil. Stabilitas percepatan ekonomi terjadi pada bidang investasi, industri pengelolaan nonmigas, daya saing ekspor, pemantapan infrastruktur dan energi. Stabilitas ekonomi akan diikuti pembangunan ekonomi semakin efisien, inflasi yang terkendali, serta angka pengangguran yang semakin menurun walaupun terjadi fluktuasi harga BBM dan nilai tukar rupiah menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi pada suatu sisi. Di sisi lain melemahnya nilai tukar menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi pada suatu sisi melemahnya nilai tukar rupiah mendorong semakin meningkatnya ekspor komoditas perkebunan sebagai komoditas unggulan ekspor non migas. Oleh karenanya dengan melakukan perubahan terhadap komposisi anggaran dan belanja daerah Provinsi Riau dan melakukan rekonstruksi terhadap program kegiatan yang telah ditetapkan. Diyakini pembangunan Provinsi Riau masih tetap berjalan sesuai dengan target capaian ekonomi daerah sebagaimana telah dirumuskan pada dokumen RKPD 2018.

Dengan mempertimbangkan point diatas tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2018 yang selanjutnya juga diikuti dengan penyusunan Perubahan Rencana

Kerja dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

## **I.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 ini mengacu pada surat edaran gubernur riau nomnor 110/SE/2018 tanggal 3 Juli 2018 dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Dasar Pertimbangan
- I.5. Sistematika Penulisan


### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016 SAMPAI TRIWULAN II**

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 s/d 2016
- II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018

### **BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD**

- III.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja OPD
- III.2. Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja OPD Tahun 2018

### **BAB IV. PENUTUP**



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENJA SKPD**



## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 s/d 2017**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berkaitan dengan telah disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan dengan mempertimbangkan perubahan perubahan akibat pergeseran RKPD Provinsi Riau Tahun 2018, maka berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, pengisian table II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau s/d Triwulan II tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan 2017 :

Pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 8 program dan 99 kegiatan dengan total anggaran biaya sebesar Rp. 49.445.313.354 dengan rincian jumlah anggaran biaya langsung (BL) sebesar Rp.30.983.884.300 dengan realisasi sebesar Rp. 18.229.447.969 atau 59,06 % realisasi fisik sebesar 60,14 % , jumlah

anggaran biaya tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 18.461.429.054 dengan realisasi sebesar Rp. 15.803.859.208 atau 85,60 % realisasi fisik tertimbang 85,60 % pencapaian realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 34.103.307.177 atau 68,97 % realisasi fisik 72,87 % termasuk sedang dikarenakan beberapa hambatan yang dikarenakan : (i) Keterlambatan masa pelantikan gubernur terpilih , (ii) Polemik SOTK karena APBD tahun 2014 masih menggunakan SOTK lama sementara SOTK baru telah disahkan sehingga menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 10 program dan 121 kegiatan dengan total anggaran biaya Rp.75.510.323.215 dengan rincian yang jumlah anggaran biaya langsung (BL) sebesar Rp.51.028.502.100 dengan realisasi sebesar Rp 35.179.915.774 atau 68,94 % realisasi fisik sebesar 84,59 % , jumlah anggaran biaya tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 24.481.821.115 dengan realisasi Rp.16.731.680.508 atau 68,34 % realisasi fisik sebesar 68,34 % pencapaian realisasi pada tahun 2015 diatas rata rata realisasi APBD Provinsi Riau tahun 2015, adapun hambatan yang terjadi dikarenakan (i) Masa transisi perpindahan dari SOTK lama ke SOTK baru, (ii) Pejabat struktural eselon II belum ditetapkan pada awal tahun dikarenakan SOTK baru, (iii) Keterlambatan dalam pengesahan APBD Perubahan yang disahkan sudah mendekati akhir tahun 2015.

Pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 11 program dan 124 kegiatan dengan total anggaran biaya Rp.62.789.968.140,52 dengan rincian yang jumlah anggaran biaya langsung (BL) sebesar Rp.44.148.731.191,13 dengan realisasi sebesar Rp 41.488.601.571 atau 93,97 % realisasi fisik sebesar 99,83 % , jumlah anggaran biaya tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 18.641.236949,39 dengan realisasi Rp.18.595.285.850 atau 99,75 % realisasi fisik sebesar 100 % pencapaian realisasi pada tahun 2016 diatas rata rata realisasi APBD Provinsi Riau tahun 2016 dan sangat baik.

Pada tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 10 program dan 77 kegiatan dengan total anggaran biaya Rp. 40.321.866.071 dengan rincian yang jumlah anggaran biaya langsung (BL) sebesar Rp. 23.978.315.808 dengan realisasi sebesar Rp 21.649.315.716 atau 98.66 % realisasi fisik sebesar 90.29 % , jumlah

anggaran biaya tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 16.343.550.263,45 dengan realisasi Rp. 15.485.572.082 atau 94,75 % realisasi fisik sebesar 100 % pencapaian realisasi pada tahun 2017 diatas rata rata realisasi APBD Provinsi Riau tahun 2017 dan sangat baik. Berdasarkan evaluasi realisasi anggaran dan fisik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 berada pada peringkat 1 dengan realisasi anggaran 92,04 % dan fisik 99,93 %.



0.0 0	00	005	026	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	98 Orang	1.353.344.000	71	830.770.946	44	575.916.600	0	0	3	18.199.200	0	0	0	3	18.199.200	6,82	3,16	74	848.970.146	75,51	62,73	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						6,82	3,16	75,51	62,73		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sedang	Rendah	
<b>PENUNJANG URUSAN</b>																											
<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																											
5	3	3	15	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan																						
3.0 0	03	15	0008	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	176 Orang	21.353.043.850	92	10.989.928.225	41	4.741.676.200	0	475.250.000	27	1.359.785.248	0	0	0	27	1.835.035.248	65,85	38,70	119	12.824.963.473	67,61	60,06	
3.0 0	03	15	0009	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	6 Orang	415.157.520	4	279.915.800	1	71.170.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	279.915.800	66,67	67,42	
3.0 0	03	15	010	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	39 Orang	3.785.075.434	27	2.363.838.346	6	670.985.900	0	4.011.700	4	77.414.108	0	0	0	4	81.425.808	66,67	12,14	31	2.445.264.154	79,49	64,60	
3.0 0	03	15	016	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan	284 Orang	2.787.873.600	34	812.941.600	17	579.273.600	0	18.011.000	0	60.935.480	0	0	0	0	0	78.946.480	0,00	13,63	34	891.888.080	11,97	31,99
3.0 0	03	15	017	Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang diberangkatkan untuk tugas belajar di luar negeri	12 Orang	13.000.000.000	0	0	6	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						26,5	12,89	45,15	44,82		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6	3	3	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara																						
3.0 0	03	16	030	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Jumlah anggota Dewan Pengurus KORPRI yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi	429 Orang	440.199.235	143	135.800.000	143	153.735.800	0	0	0	6.018.500	0	0	0	0	6.018.500	0,00	3,91	143	141.818.500	33,33	32,22	
3.0 0	03	16	061	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assesor Provinsi Riau	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan dan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	80 Orang	1.327.062.500	0	0	25	201.499.100	0	33.708.100	46	155.281.350	0	0	0	46	188.989.450	184,00	93,79	46	188.989.450	57,50	14,24	
3.0 0	03	16	072	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	6 Kegiatan	248.084.000	1	77.699.500	1	61.357.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	77.699.500	16,67	31,32	
3.0 0	03	16	073	Persemayaman dan Pemakaman Angta KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan	30 Kali	172.707.100	0	0	20	78.057.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						46	24,43	26,88	19,44		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7	3	3	17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional																						
3.0 0	03	17	031	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	2.144 Orang	1.352.245.565	2.146	1.027.697.965	500	113.044.800	0	31.473.600	0	36.573.600	0	0	0	0	68.047.200	0,00	60,19	2.146	1.095.745.165	100,09	81,03	
3.0 0	03	17	035	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tapetarum dan taspen PNS se Provinsi	5 Dokumen	523.911.300	3	306.745.400	1	69.826.300	0	0	1	13.485.000	0	0	0	1	13.485.000	100,00	19,31	4	320.230.400	80	61,12	
3.0 0	03	17	047	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK	109 Orang	1.430.987.500	77	1.140.257.600	7	100.000.000	0	4.000.000	12	97.323.800	0	0	0	12	101.323.800	171,43	101,32	89	1.241.581.400	81,65	86,76	
3.0 0	03	17	056	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti	85 Orang	3.659.421.800	0	0	20	645.699.800	0	0	0	35.754.000	0	0	0	0	35.754.000	0,00	5,54	0	35.754.000	0	0,98	
3.0 0	03	17	057	Monitoring IPDN	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Monitoring IPDN di 8 Resignal Kamopus IPDN	5 Dokumen	1.109.088.900	3	708.014.787	1	213.960.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	708.014.787	60	63,84	
3.0 0	03	17	060	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau di 12 Kabupaten/kota	5 Dokumen	792.674.000	3	529.991.400	1	92.674.000	0	5.603.800	0	52.141.291	0	0	0	0	57.745.091	0,00	62,31	3	587.736.491	60	74,15	
3.0 0	03	17	066	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dililingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota	5 Dokumen	924.680.900	3	591.692.300	1	114.912.600	0	0	1	70.959.200	0	0	0	1	70.959.200	100,00	61,75	4	662.651.500	80	71,66	
3.0 0	03	17	068	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada	1.086 Orang	5.842.223.910	606	2.570.077.700	250	877.624.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	606	2.570.077.700	55,80	43,99	
3.0 0	03	17	070	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	1.640 Orang	1.598.969.000	1.230	984.340.100	380	192.433.000	0	11.544.400	0	11.544.400	0	0	0	0	0	23.088.800	0,00	12,00	1.230	1.007.428.900	75	63,00



3.0	03	19	0002	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa	380	Orang	542.351.350	240	310.441.150	80	75.923.200	0	0	40	117.594.800	0	0	0	40	117.594.800	50,00	154,89	280	428.035.950	73,68	78,92	
3.0	03	19	0006	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah berkas SKP Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi	24.554	Berkas	583.615.900	0	0	16.800	111.467.900	0	0	8.000	225.827.100	0	0	0	8.000	225.827.100	47,62	202,59	8.000	225.827.100	32,58	38,69	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						48,81	178,74	53,13	58,81			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Rendah	Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)																						37,42	63,88	59,1	56,36			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)																						Sangat Rendah	Rendah		Rendah	Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :-																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :-																												
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya :-																												
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya :-																												

## **II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2018 sampai dengan Triwulan ke II**

Realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan II (30 Juni) anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2017 sebesar Rp. 16.143.732.253,00 dengan rincian realisasi belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 17.465.360.841,83 dengan realisasi Rp. 7.943.861.897,00 atau 45,48 %, dan belanja langsung Rp 30.809.619.106 dengan realisasi Rp. 8.199.870.356,00 atau 26,61 % terdiri dari 9 Program dan 64 Kegiatan dengan realisasi kegiatan yang telah selesai sebanyak 5 kegiatan serta capain target kinerja sebesar 47 %. Secara ringkas realisasi pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2017 hingga triwulan II ditunjukkan pada tabel II.1





**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN DALAM**  
**PERUBAHAN RENJA SKPD**

# **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD**

### **III.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tahun 2018**

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai :

Adapun tujuan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada APBD Perubahan tahun 2018 bagi setiap bagian dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 adalah :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang ada untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019
2. Tersusunnya Program dan kegiatan dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada

tahun 2018.

### **III.2. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses Rencana Kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmark) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada perubahan rencana kerja tahun 2018 pada OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2018 dalam aspek Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk Pemanjangan Aparatur dan Birokrasi Pemerintah serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam mencapai sasaran strategis ini dana yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018 untuk Belanja Langsung (BL) dengan pagu adalah sebesar Rp. 22,614,363,636.00 (dua puluh dua milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bergeser dari pagu sebelumnya Rp. 31,413,766,776.00 (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan perkiraan maju pagu Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 39,635,577.650 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Dan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan pagu sebesar Rp. 20,982,207,761,83 (dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma delapan puluh tiga sen)

dan bergeser dari pagu sebelumnya Rp. 17.465.360.841,83 (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh tiga sen).

Pengurangan anggaran dilakukan terhadap

1. Anggaran belanja langsung
2. Anggaran perjalan dinas dan kegiatan yang dirasionalisasikan dari belanja langsung

Untuk tahun 2018 terdapat 9 Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 yaitu :

Non Urusan

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran : 13 Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana : 3 Kegiatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 5 Kegiatan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 6 Kegiatan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 3 Kegiatan

Urusan Wajib

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 33 Kegiatan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 19 Kegiatan
3. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipi Negara : 14 Kegiatan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur : 2 Kegiatan
5. Program Pendidikan Kedinasan : 5 Kegiatan

Adapun rincian perubahan rencana kegiatan per program serta indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2018										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											49,268,721,683.66	42,468,816,874.28					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG										17,465,360,841.83	19,854,453,238.28					
3.00.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										31,413,766,776.00	22,614,363,636.00				39,635,577.65	
3.00.03.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang					100 Persen	100 Persen	4,214,252,620.00	5,834,762,220.00					5,657,727.29	
3.00.03.3.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 12 bln	Jumlah surat yang dikirim	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	3.075 Surat	320 Surat	23,517,000.00	23,514,000.00	APBD I	APBD I	320 Surat	23,517.00	Lanjutan	
3.00.03.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bln	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	257.000 VA	12 Bulan	976,245,000.00	1,236,245,000.00	APBD I	APBD I	12 Bulan	973,845.00	Lanjutan	
3.00.03.3.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	20 Unit	20 Unit	481,050,000.00	1,245,809,200.00	APBD I	APBD I	150 Unit	1,301,500.00	Lanjutan	
3.00.03.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	10 Unit Mobil dan 4 Unit Motor	14 Unit	189,402,800.00	201,402,800.00	APBD I	APBD I	14 Unit	190,691.51	Lanjutan	
3.00.03.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga dan bahan kebersihan untuk pelaksanaan kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	24 Orang, 35 Jenis	12 Bulan	692,574,000.00	792,574,000.00	APBD I	APBD I	12 Bulan	703,500.00	Lanjutan	
3.00.03.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor pada kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	37 Jenis	12 Bulan	84,092,600.00	114,092,600.00	APBD I	APBD I	12 Bulan	100,500.00	Lanjutan	
3.00.03.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	26 Jenis	12 Bulan	100,500,000.00	200,000,000.00	APBD I	APBD I	12 Bulan	100,500.00	Lanjutan	
3.00.03.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1.241 buah, 56 roll	12 Bulan	74,985,220.00	74,985,220.00	APBD I	APBD I	12 Bulan	92,960.99	Lanjutan	

3.00.03.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah yang tersedia	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	528 Exp	12 Bulan	69,000,000.00	100,000,000.00	APBD I	APBD I	12 Bulan	159,951.20	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	4.620 Porsi	4.620 Porsi	99,600,000.00	149,600,000.00	APBD I	APBD I	4.620 Porsi	202,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	-	-	Kabupaten dan Luar Daerah	Kabupaten dan Luar Daerah	12 Kali	100 Kali	699,466,000.00	1,040,519,400.00	APBD I	APBD I	120 Kali	852,781.58	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	23 Orang	12 Bulan	648,820,000.00	656,020,000.00	APBD I	APBD I	12 Bulan	805,980.00	Baru
3.00.03.3.00.03.01.01.116.	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau / Riau	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau / Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Kali	0 Kali	75,000,000.00	0	APBD I	APBD I	1 Kali	150,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	-	-			100 Persen	100 Persen	545,454,100.00	1,529,864,500.00				1,571,580.00	
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	2.393 M2	2 Unit	258,454,100.00	1,242,864,500.00	APBD I	APBD I	2 Unit	1,275,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	161 Unit	189 Unit	70,000,000.00	70,000,000.00	APBD I	APBD I	228 Unit	70,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	895 kali, 103 buah, 20 roll	526 Unit	217,000,000.00	217,000,000.00	APBD I	APBD I	230 Unit	226,580.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	-	-			100 Persen	100 Persen	505,958,200.00	473,881,400.00				1,101,862.32	
3.00.03.3.00.03.01.03.006.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	135 Orang	135 Orang	52,489,700.00	122,489,700.00	APBD I	APBD I	135 Orang	62,240.00	Lanjutan

3.00.03.3.00.03.01.03.012.	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah PNS yang diambil sumpah	Jumlah PNS yang diambil sumpah	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	300 Orang	-	26,616,200.00	0			350 Orang	88,082.32	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.03.013.	Pemantauan disiplin PNS	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Dokumen	1 Dokumen	73,291,700.00	73,452,300.00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	180,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.03.014.	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Jumlah Penanganan Kasus Kasus	Jumlah Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	60 Kasus	60 Kasus	105,466,400.00	98,238,000.00	APBD I	APBD I	60 Kasus	185,925.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.03.016.	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti konseling psikologi	Jumlah ASN yang mengikuti konseling psikologi	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	48 Orang	48 Orang	66,165,300.00	61,888,500.00	APBD I	APBD I	150 Oarng	285,615.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.03.037.	Konsultasi dan Bantuan Hukum	Jumlah ASN Yang Diberikan Konsultasi dan Bantuan Hukum	Jumlah ASN Yang Diberikan Konsultasi dan Bantuan Hukum	Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi dan Kabupaten/Kota	21 Orang	21 Orang	181,928,900.00	117,812,900.00	APBD I	APBD I	40 Orang	300,000.00	Baru
3.00.03.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil					100 Persen	100 Persen	575,916,600.00	243,938,700.00				612,000.00	
3.00.03.3.00.03.01.05.026.	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS Pemprov Riau yang mengikuti diklat fungsional tertentu	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	44 Orang	31 Orang	575,916,600.00	243,938,700.00	APBD I	APBD I	31 Orang	612,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.15.	Program Pendidikan Kedinasan		Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan					50 Orang	50 Orang	14,063,105,800.00	4,750,178,208.00				18,762,259.55	
3.00.03.3.00.03.01.15.008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS Pemprov Riau yang mendapatkan beasiswa tugas belajar luar negeri	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	41 Orang	38 Orang	4,741,676,200.00	3,948,269,800.00	APBD I	APBD I	38 Orang	6,500,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.15.009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pejabat Eselon I yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	1 Orang	-	71,170,100.00	0			1 Orang	86,670.02	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.15.010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pejabat Eselon II yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	6 Orang	8 Orang	670,985,900.00	488,506,608.00	APBD I	APBD I	8 Orang	815,589.53	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.15.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Praja IPDN dan STTD mengikuti pendidikan kedinasan	Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN/Taruna STTD terfasilitasi dan Pemberian Penunjang Pendidikan serta pembinaan Alumni	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	17 Orang	25 Orang	579,273,600.00	313,401,800.00	APBD I	APBD I	55 Orang	1,360,000.00	Baru

3.00.03.3.00.03.01.15.017.	Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang diberangkatkan untuk tugas belajar di luar negeri	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang diberangkatkan untuk tugas belajar di luar negeri	-	-	Luar Negeri	Luar Negeri	6 Orang	-	8,000,000,000.00	0			8 Orang	10,000,000.00	Baru
3.00.03.3.00.03.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara					100 Persen	100 Persen	494,649,000.00	546,817,300.00				867,298.43	
3.00.03.3.00.03.01.16.030.	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Jumlah anggota Dewan Pengurus KORPRI yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi	Jumlah anggota Dewan Pengurus KORPRI yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	143 Orang	143 Orang	153,735,800.00	145,939,800.00	APBD I	APBD I	120 Orang	136,463.43	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.16.061.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	25 Orang	25 Orang	201,499,100.00	355,150,500.00	APBD I	APBD I	30 Orang	504,108.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.16.072.	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	61,357,000.00	45,727,000.00	APBD I	APBD I	1 Kegiatan	106,727.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.16.073.	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Anggota KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Anggota KORPRI Yang Meninggal	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	20 Orang	0 Orang	78,057,100.00	0	APBD I	APBD I	20 Orang	120,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang					100 Persen	100 Persen	8,637,463,058.00	4,646,427,700.00				7,784,199.55	
3.00.03.3.00.03.01.17.031.	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan Satya	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan Satya	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	500 Orang	500 Orang	113,044,800.00	153,426,200.00	APBD I	APBD I	500 Orang	150,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tapetarum dan taspen PNS se	Hasil monitoring PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang	-	-	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	69,826,300.00	63,169,100.00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	125,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.047.	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	7 orang	22 orang	100,000,000.00	294,125,400.00	APBD I	APBD I	26 Orang	218,587.50	Baru
3.00.03.3.00.03.01.17.056.	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kemampuan teknis tenaga Fungsional Peneliti	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	20 Orang	20 Orang	645,699,800.00	131,285,800.00	APBD I	APBD I	20 Orang	770,000.00	Lanjutan



3.00.03.3.00.03.01.17.057.	Monitoring IPDN	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Monitoring IPDN di 8 regional kampus	Hasil Monitoring IPDN di 8 regional kampus IPDN	-	-	8 Kampus Regional 1 Kampus Pusat	8 Kampus Regional 1 Kampus Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	213,960,900.00	223,091,900.00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	242,564.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.060.	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau di 12 Kabupaten/kota	Hasil monitoring dan evaluasi jabatan fungsional PNS Provinsi Riau	-	-	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	92,674,000.00	85,405,200.00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	150,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.066.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota	Hasil data SKP Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota yang dimonitoring	-	-	12 Kabupaten/kota	12 Kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	114,912,600.00	105,318,000.00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	150,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah peserta Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	250 Orang	250 Orang	877,624,700.00	971,503,900.00	APBD I	APBD I	250 Orang	1,119,377.91	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.070.	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian	-	-	Pekanbaru dan Kabupaten	Pekanbaru dan Kabupaten	380 Orang	200 Orang	192,433,000.00	46,631,100.00	APBD I	APBD I	200 Orang	413,150.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	7000 Dokumen elektronik	6000 Dokumen elektronik	224,942,700.00	267,966,100.00	APBD I	APBD I	7000 Dokumen elektronik	308,400.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.098.	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Jumlah jenis cabang olahraga yang dipertandingkan antar OPD Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka memeriahkan Ulang Tahun KORPRI	Jumlah pegawai negeri sipil yang mengikuti perlombaan HUT KORPRI	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Kegiatan, 8 Cabang olahraga	200 Orang	104,527,300.00	109,000,000.00	APBD I	APBD I	200 Orang	182,407.50	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.100.	MTQ Nasional KORPRI	Jumlah peserta MTQ korpri provinsi dan MTQ nasional korpri	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dikirim mengikuti MTQ korpri provinsi dan MTQ nasional	-	-	Luar daerah	Luar daerah	120 orang MTQ provinsi/10 orang MTQ nasional	130 Orang	702,789,300.00	664,690,800.00	APBD I	APBD I	-	800,000.00	Lanjutan

3.00.03.3.00.03.01.17.109.	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan Manajemen Kepegawaian dengan BKD 12 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	-	-	12 Kabupaten/kota	12 Kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	166,787,500.00	191,475,000.00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	200,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.114.	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah aplikasi e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Aplikasi	1 Sistem	4,221,199,958.00	927,942,700.00	APBD I	APBD I	1 Sistem	2,000,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.116.	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Administrasi Provinsi Riau yang terpelakan berdasarkan kompetensinya	Jumlah Jabatan Administrasi Provinsi Riau yang terpelakan berdasarkan kompetensinya	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	960 Orang	-	364,580,800.00	0			500 Orang	254,712.64	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.117.	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Jumlah dokumen laporan tentang Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Dokumen	50 Jabatan	164,380,900.00	188,824,100.00	APBD I	APBD I	1200 Jabatan	250,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.120.	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota se Provinsi Riau	Jumlah JPT yang di monitoring dan dilaksanakan di 12 Kabupaten Kota	-	-	Kabupaten/kota	Kabupaten/kota	1 Dokumen	360 Orang	88,674,500.00	75,544,400.00	APBD I	APBD I	360 Orang	150,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.17.127.	Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen pelaksanaan Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Provinsi Riau	Hasil monitoring dan pendampingan Kenaikan Pangkat Kabupaten/kota	-	-	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	179,404,000.00	147,028,000.00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	300,000.00	Baru
3.00.03.3.00.03.01.18.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan					80 Persen	80 Persen	2,189,576,898.00	4,075,990,508.00				3,198,650.50	

3.00.03.3.00.03.01.18.001.	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah PNS Pindah Tugas	Jumlah penataan Pindah Tugas PNS	-	-	Pekanbaru dan Kabupaten	Pekanbaru dan Kabupaten Kota	3.000 Orang	1.500 Orang	241,926,100.00	634,248,900.00	APBD I	APBD I	1.500 Orang	400,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.002.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Riau yang Pensiun	Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	400 Orang	400 Orang	136,415,900.00	185,000,000.00	APBD I	APBD I	500 Orang	410,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.006.	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	Jumlah ASN Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	4.000 Orang	4.000 Orang	248,746,000.00	259,684,000.00	APBD I	APBD I	4.000 Orang	500,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah usulan SK jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau	Jumlah PNS Jabatan Fungsi Provinsi Riau yang dikelola	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	2.000 Orang	1.000 Orang	107,622,900.00	313,496,000.00	APBD I	APBD I	1.100 Orang	200,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.009.	Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Operasional Prosedur Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik BKD Provinsi Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Dokumen	1 Dokumen	103,214,000.00	732,495,400.00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	110,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.011.	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah PNS Provinsi Riau yang di data melakukan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelola	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	300 Orang	300 Berkas	159,924,500.00	254,896,110.00	APBD I	APBD I	350 Berkas	250,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.013.	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen penyusunan formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan	-	-	Pekanbaru dan Kabupaten	Pekanbaru dan Kabupaten	1 Dokumen	500 Formasi	226,836,600.00	243,998,400.00	APBD I	APBD I	250 Formasi	393,650.50	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah usulan SK PNS Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ditempatkan sesuai dengan Jabatan dan Kompetensinya	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	500 Orang	500 Orang	209,331,000.00	663,349,800.00	APBD I	APBD I	500 Orang	250,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.020.	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau	Jumlah PNS Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau yang dilantik dan di sumpah	Jumlah Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Provinsi Riau yang diambil sumpah dan pelantikan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	500 Orang	500 Orang	19,569,900.00	30,023,000.00	APBD I	APBD I	500 Orang	25,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.023.	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau yang diusulkan	Jumlah jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau yang diusulkan angka	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	50 Orang	-	63,974,100.00	0			50 Orang	120,000.00	Lanjutan

3.00.03.3.00.03.01.18.025.	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat yang di Verifikasi	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	4000 Orang	4000 Berkas	375,016,000.00	374,816,000.00	APBD I	APBD I	4000 Berkas	400,000.00	Baru
3.00.03.3.00.03.01.18.026.	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah usulan penyesuaian Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengajukan Penggunaan Gelar	-	-	Pekanbaru dan Jakarta	Pekanbaru dan Jakarta	50 Orang	50 Orang	45,393,000.00	32,339,000.00	APBD I	APBD I	50 Orang	50,000.00	Baru
3.00.03.3.00.03.01.18.027.	Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau	Jumlah liputan kegiatan BKD setiap bulan	Rentang waktu pengelolaan humas BKD	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 Kegiatan	12 Bulan	114,963,000.00	165,000,000.00	APBD I	APBD I	12 Bulan	0	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.18.028.	Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau	Jumlah website yang dikelola	Jumlah Informasi Berita Web Site Badan Kepegawaian Daerah selama 1	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 website	70 Berita	51,643,898.00	51,643,898.00	APBD I	APBD I	70 Berita	0	Baru
3.00.03.3.00.03.01.18.029.	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan yang dikembangkan	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan yang dikembangkan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Aplikasi	1 Aplikasi	85,000,000.00	135,000,000.00	APBD I	APBD I	1 aplikasi	90,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur		Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki	-	-			2 Persen	2 Persen	187,390,500.00	512,503,100.00				80,000.00	
3.00.03.3.00.03.01.19.002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah PNS Memasuki Masa Pensiun yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	80 Orang	200 Orang	75,923,200.00	244,622,800.00	APBD I	APBD I	100 Orang	80,000.00	Lanjutan
3.00.03.3.00.03.01.19.006.	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah PNS yang dilakukan penilaian kinerja terhadap SKPnya	Jumlah berkas SKP Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	16.800 orang	16.800 Berkas	111,467,300.00	267,880,300.00	APBD I	APBD I	-	0	Lanjutan
TOTAL										31,413,766,776.00	22,614,363,636.00					



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2018 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

